

Edisi Kedua

SOSIOLOGI INDUSTRI



Di dalam buku ini berisi tentang sosialisasi industri yang ada hubungannya dengan dunia kerja serta kehidupan manusia yang terlibat didalamnya, termasuk konflik internal maupun eksternal.

Sistem kapitalisme yang dibangun oleh orang-orang eropa, hanya bisa menguntungkan bagi kaum borjuis (pemilik modal), karena mereka mampu membeli para tenaga buruh dengan imbalan yang sangat minim, akhirnya para pemilik modal semakin kaya sementara buruh semakin miskin.

Dalam kerangka dasar masyarakat Islam (masyarakat harmonis), mengharapkan adanya rasa persaudaraan dan saling membantu antara kaum borjuis dan proletar, walaupun naluri menolak akan sifat ke-egoisannya (dalam hal ini kaum kapitalis dan borjuis).

Dalam proses perkembangan industrialisasi di tanah air maupun di tingkat internasional, pemerintah diharapkan dapat mengendalikan peraturan-peraturan, perundang-undangan ataupun batasan-batasan yang sifatnya tidak merugikan bagi para penanam modal atau investor, misalnya pajak tinggi dan Mahkamah Agung dapat menjamin industri dari setiap ancaman intervensi yang bersikap bermusuhan. dengan berhasilnya industrialisasi ini, maka sarana dan prasarana akan sangat mudah untuk kita nikmati bersama.



JAUDAR PRESS
PERCETAKAN DAN PENERBITAN
JL. JEMUR WONOSARI LEBAR 61
SURABAYA 60237
TELEP & FAX (031)8491461

SOSIOLOGI INDUSTRI



JAUDAR PRESS

Selanjutnya mulailah dilakukan politik merkantilitas yang ketat (politik ekonomi nasional yang melindungi industri sendiri dan mengusahakan peningkatan ekspor). Tetapi diperbandingkan dengan merkantilisme Portugal, Spanyol dan Perancis (abad ke-XVI dan ke-XVII), raja Inggris tidak cukup absolut kekuasaannya, untuk menjalankan merkantilisme yang semata-mata fiscal (untuk menambah perbendaharaan raja) dan demikian mendapat pengertian dan dukungan yang lebih umum. Didirikanlah kompeni-kompeni bermonopoli untuk berdagang dengan Laut Baltik (dimana perserikatan Hansa sangat diperlemah), dengan Levant (bagian Timur Laut Tengah), dengan India dan Cina, dan terutama dengan kepulauan-kepulauan di teluk Meksiko (India Barat) serta koloni-koloni di Amerika Utara. Pada pertengahan abad ke-XVII Inggris merasa siap untuk menentang perkapalan dan angkatan laut saingan-saingannya (terutama Belanda) dengan memaklumkan "navigation Acts"-nya dan sejumlah perang lautan. (A. Toynbee, 1956, 45-47).

Dalam rangka perluasan perdagangan serta industri dan peningkatan kemakmuran, maka bulu domba dan industri kain bulu domba tetap memainkan peranan yang sangat penting. Hal ini memperkuat usaha tuan-tuan tanah yang disebut "Revolusi Agraria Pertama" dan yang telah dimulai pada abad ke-XV ketika ekspor bulu domba ke daratan Eropa meningkat. Seorang tuan-tanah pada umumnya mempunyai hak atas sepertiga dari tanah suatu desa. Tetapi bagian ini terpecah di antara bagian-bagian kaum tani dan dikerjakan oleh para petani itu dengan cuma-cuma, sedangkan tanah mereka sendiri dipajaki. Dalam menggarap tanah dan menyelenggarakan peternakan (domba) kaum tani masih menggunakan cara-cara kolot dan sikap acuh tak acuh. Maka banyak tuan-tanah (tentu saja hanya dalam wilayah minta persetujuan erat dengan pemeliharaan domba) untuk persetujuan parlemen (yang mereka kuasai) untuk mempersatukan tanah bagian mereka yang tersebar. Ini berarti memotong wilayah desa dalam tiga

yang agak penting dalam rangsangan ke perkembangan kapitalisme adalah perluasan perniagaan lewat lautan yang jauh, yang berlangsung cepat dan berkembang sebagai hasil penemuan-penemuan geografis yang mengejutkan yang diperoleh di dalam bagian terakhir abad kelima belas. Termasuk di dalam penemuan-penemuan geografis ini, terutama penemuan Amerika dan pelayaran mengelilingi Tanjung Harapan, yang memberikan perkembangan yang cepat pada perniagaan, navigasi dan industri suatu dorongan yang sebelumnya belum pernah diketahui orang, juga kepada unsur revolusioner di dalam masyarakat feodal yang sedang goyah. Pemasukan capital yang cepat, yang berasal dari perniagaan yang tumbuh subur bagaikan jamur, ditambah pula oleh membanjirnya logam-logam mulia ke dalam negeri sejak penemuan emas dan perak, melanda tata sosial dan ekonomi yang telah ada di Inggris. Pabrik-pabrik baru didirikan di kota-kota pelabuhan dan dipusat-pusat negeri, di luar penguasaan kota-kota perniagaan yang lebih tua dan organisasi-organisasi serikat kerjanya. Usaha-usaha baru didirikan itu mengalami pertumbuhan cepat, kendatipun ada perlawanan sengit dari pihak kota-kota niaga terhadap tempat-tempat bibit perindustrian baru. Dengan demikian kapitalisme modern bermula di tempat yang jauh letaknya dari pusat-pusat perfabrikan lama, yang didasarkan atas perniagaan maritime dan yang melintasi negeri dalam skala besar.

Operasi-operasi tambahan dari daerah pedesaan yang berkaitan dengan pemintalan tenun yang memerlukan sedikit latihan teknis. Masyarakat pedesaan itu merupakan tempat terakhir untuk perkembangan kapitalisme dalam bentuk yang paling murni dan paling logis, namun dorongan pertamanya adalah di situ. Sebelum tingkat ini tercapai, kapital belum merupakan kekuatan revolusioner. Di samping perkembangan *merkantilisme* yang terlebih dulu yang berawal pada abad kesebelas, berperilaku sebagai suatu faktor utama dalam peleburan struktur-struktur feodal, maka kota-kota yang berkembang itu pada intinya senantiasa tergantung kepada sistem lama dan memainkan suatu peran

sejak permulaan beroperasi di luar serikat-serikat pekerja dan berselisih dengan mereka. Di samping Marx hanya memberikan sedikit tanda bagaimana cara perkembangan yang kedua ini terjadi dalam proses produksi, dia juga memperincikan beberapa aspek dari proses yang terjadi dalam pertanian Inggris. Pada pertengahan abad ke tujuh belas, banyak tanah dimiliki oleh petani-petani kapitalis yang mempekerjakan buruh penerima upah dan memproduksi untuk suatu pasar komoditi. Milik mereka menjadi meningkat berkat pengambil-alihan secara paksa tanah-tanah yang selamat dari penyerobotan pada periode feodal. Akan tetapi proses penyerobotan tanah-tanah tersebut merupakan suatu proses panjang dan tidak berhenti sampai pertengahan kedua abad kedelapan belas. Proses ini baru berakhir bersamaan dengan lenyapnya secara keseluruhan pertanian merdeka, yang memasukkan tanah sebagai kapital dan menciptakan bagi industri-industri kota pekerja buruh yang diperlukan, walaupun hal ini dilarang.

Marx membedakan dua tingkatan organisasi produksi pada periode kapitalis. Tingkatan pertama dikuasai oleh perpabrikasi. Ciri yang nyata bentuk ini ialah digantikannya keterampilan pertukangan menjadi berbagai tugas khusus yang dilakukan oleh sejumlah pekerja, yang secara kolektif menyelesaikan sesuatu yang dapat ditangani sendiri oleh satu orang terampil di bawah sistem serikat kerja. Perpabrikasi lebih efisien daripada produksi kerajinan tangan, bukan karena ada kemajuan teknik apapun, akan tetapi berkat adanya pembagian kerja yang memungkinkan untuk memproduksi lebih banyak unit-unit per-orang/jam. Bentuk produksi yang paling menonjol sejak abad keenam belas sampai bagian akhir dari abad kedelapan belas di Inggris ini mempunyai batas-batas tertentu. Perluasan pasaran-pasaran di akhir abad kedelapan belas demikian besarnya sehingga produktivitas perpabrikasi tidak cukup memenuhi permintaan yang ada. Sebagai akibatnya, timbul suatu dorongan untuk menciptakan cara-cara produksi yang secara teknis lebih efisien: perkembangan mesin-mesin merupakan konsekuensi dari kebutuhan-kebutuhan pasar. Hasilnya ialah

mereka. Dengan demikian, maka kapitalisme itu merupakan suatu masyarakat kelas, pada hakikatnya; eksistensi suatu kelas borjuis, mempreduga adanya suatu kelas yang terbawahi, terdiri atas buruh pekerja yang tidak mempunyai apa-apa dan sebaliknya juga. Akan tetapi, sistem kelas kapitalisme berlainan dengan sangat pasti daripada bentuk masyarakat yang mendahuluinya di Eropa. Dalam feodalisme, dominasi pasti dilandasi atas pelbagai jalan masuk ke dalam penguasaan sarana-sarana produksi, yaitu pemilikan tanah. Akan tetapi struktur kelas feodal, yang diungkapkan dalam keanekaragaman di antara para stande, tidak sama sekali memisahkan si pribadi orang dari partisipasinya dalam antar hubungan komunal; yang sosial dan yang ekonomi tidak terpisah jelas. Timbulnya kapitalisme mengubah pertalian-pertalian pasaran: si pribadi orang berfungsi sebagai seorang anggota dari suatu komunitas danya dalam arti abstrak, di dalam mana dia mempunyai hak-hak sebagai warga dalam suatu lingkungan politik yang terpisah. Dengan demikian, maka orde sosial modern memisahkan inti subjektif manusia dari penguasaan manusia, dan mentransformasikan kemampuan-kemampuan manusia sendiri ke dalam bentuk-bentuk di mana kemampuan-kemampuan itu menjadi berada di luar. Pengambil-alihan hak si pekerja secara materiil atas sarana produksinya yang dikatakan secara historis, sama saja dengan pembentukan sistem kelas pada masyarakat borjuis dengan demikian berlangsung terus menerus bergandengan dengan keterasingan dari makhluk sejenis, dari penggunaan kemampuannya dan keahliannya yang partisipasinya dalam masyarakat secara potensial bisa disajikan kepadanya. Dengan kata lain, kapitalisme itu sangat meninggikan kekuatan-kekuatan produksi masyarakat, akan tetapi hanya dengan mengorbankan keterasingan yang maksimal. Dalam masyarakat borjuis, penjelasan rasional tentang dunia melalui sains, untuk sebagian besar telah menghilangkan gambaran dunia menurut agama, menurut mana realisasi itu akhirnya diatur dan dikuasai oleh dewa-dewa atau

yang ada, dari sekian kebijakan yang paling efektif adalah kebijakan yang lebih didasarkan pada kekuatan atau mekanisme pasar yakni pengenaan tarif pajak emisi dan penerbitan surat izin emisi. Dampaknya terhadap pelestarian lingkungan lebih besar karena kedua kebijakan itu memberi imbalan ekonomi secara langsung kepada produsen yang lebih efisien (lebih sedikit menghasilkan polusi). Hal itu merupakan insentif ekonomi yang cukup besar bagi semua produsen untuk menekan emisi sampai ke kadar yang sekecil-kecilnya, sekaligus memberi keleluasaan gerak dan pilihan yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan industri. Selain itu, kedua kebijakan tersebut pada prakteknya nanti akan lebih mudah dijalankan. Peraturan-peraturan pembatasan emisi harus dibuat sesederhana mungkin dan semudah mungkin agar benar-benar di terapkan. Pemerintah juga bisa memberi insentif atau dorongan kepada para produsen untuk mengurangi tingkat pencemaran melalui pemberian potongan pajak atau subsidi jika produsen yang bersangkutan bersedia membeli dan memasang peralatan pencegah polusi pada setiap instalasi produksinya. Namun ironisnya, sektor-sektor industri yang paling sulit diatur adalah sektor yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan motif keuntungan memang bukan merupakan pertimbangan pokok bagi perusahaan-perusahaan milik negara itu. Lagi pula, setiap orang memang lebih mudah mengatur orang lain daripada dirinya sendiri. (Todoro, 444-445).

Pada dasarnya, banyak keuntungan dari pada kerugiannya jika kita membicarakan tentang adanya investor di Indonesia, namun walau bagaimana besar keuntungan yang bisa kita dapat dengan adanya investor di Indonesia, walaupun amatlah kecil berbandingnya, namun ada juga kerugian-kerugian yang musti dialami oleh bangsa Indonesia. Terlebih jika bangsa Indonesia tidak jeli ataupun tidak pandai-pandai diri dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bisa membatasi ruang gerak investor, jadi Negara Indonesia harus tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tidak memberikan kebebasan-kebebasan yang berlebihan pada investor luar namun harus ada koridor-koridor ataupun aturan-aturan yang membatasi ruang gerak investor asing. Dalam arti kata : kita bangsa Indonesia yang berhak membuat aturan-aturan bukan malah sebaliknya kita yang diatur oleh investor asing. Kalau tidak pandai-pandai membuat kebijakan-kebijakan bukan kita yang menjadi tuan rumah namun bisa-bisa malah berbalik investor asinglah yang akan menjadi tuan rumah di Negara kita sendiri yang mana pada akhirnya kita atau Negara Indonesia ini yang hanya akan dijadikan tempat mengambil harta karun dengan hasil bumi yang ada di Indonesia yang melimpah ruah ini. Untuk itu dalam hal ini pemerintah selaku pembuat kebijakan-kebijakan hendaknya jeli dalam menyermati segala kebijakan-kebijakan dengan investor. Bangsa Indonesia jangan sampai dijadikan sapi perahan investor asing. Karena tidak menutup kemungkinan banyak Negara asing yang tergiur dengan kekayaan alam Indonesia ini. Untuk itu bangsa Indonesia terkhusus buat pemerintah harus meningkatkan kewaspadaannya dalam setiap membuat suatu kebijakan. Apakah kebijakan-kebijakan yang telah disepakati menguntungkan bagi bangsa dan Negara Indonesia atau malah sebaliknya justru lebih banyak menguntungkan pihak asing. Hal ini yang harus lebih diwaspadai oleh bangsa Indonesia terkhusus buat pemerintah Indonesia. Terlebih jangan sampai harga diri bangsa ini tergadaikan dengan pihak asing.

Contoh Free Port, tambang emas terbesar yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dengan pihak asing yang terjadi di Papua. Banyak kerugian yang ditanggung oleh Negara Indonesia daripada keuntungan yang

memang seolah-olah terbelenggu ataupun merasa terpasang segala kebebasannya, baik kebebasan bersuara, kebebasan mengeluarkan pendapat, bahkan kebebasan menentukan pilihan hidupnya. Yang seolah-olah terpasang oleh doktrin-doktrin kekuasaan Soeharto (Rezim Soeharto) dan setelah melalui perjuangan panjang yang dipelopori oleh para mahasiswa yang tentunya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, yang menghendaki adanya kebebasan-kebebasan yang selama 32 tahun terbelenggu, pertengahan tahun 1998. Semua keinginan, akan adanya suatu perubahan tersalurkan. Pahit memang perjuangan yang dilakukan oleh mahasiswa tentunya yang didukung oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya korban material namun korban nyawa, dipertaruhkan dalam pencapaian suatu kebebasan. Memang mahal harga yang harus dibayar oleh bangsa Indonesia dalam mencapai suatu keinginan akan adanya kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat disaat rezim Soeharto bisa ditumbangkan oleh para mahasiswa beserta seluruh rakyat Indonesia yang mendukung adanya pembaharuan dalam susunan maupun tatanan Negara Indonesia disebutlah seperti yang kita ketahui bersama saat ini dengan masa reformasi.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir setelah berjalannya masa reformasi berjalan, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik kebebasan-kebebasan dan mengeluarkan pendapat, kebebasan bersuara, dalam menyuarakan aspirasi serta keinginan untuk menata kehidupan berbangsa serta bernegara menuju arah demokrasi yang selama ini tergadaikan oleh rezim Soeharto. Namun bangsa Indonesia banyak yang salah mengartikan arti kebebasan itu sendiri. Tercermin semakin maraknya akhir-akhir ini demo-demo yang bersifat anarkis yang hampir dalam kesehariannya kita jumpai terjadi dimana-mana. Banyak menggelar demo dengan merusak fasilitas-fasilitas umum maupun fasilitas pemerintah dan swasta. Serta banyak mengganggu ketertiban umum dimana demo yang dilakukan tanpa memperhitungkan tempat dan waktu, demo yang dilakukan mengambil

Contoh dulu, jika masyarakat ingin memperpanjang SIM/STNK kendaraan bermotor di kantor satlantas banyak kita jumpai berjubel-jubel para calo, jika masyarakat tidak menggunakan jasa mereka, kenyataan di lapangan, walau hanya memperpanjang SIM / STNK. Membutuhkan waktu 3 hari untuk menunggu hasil jadinya, dan terpaksa bagi masyarakat yang mempunyai Kesibukan lain tentu tidak ada waktu yang cukup, untuk hanya bolak-balik ke Kantor satlantas hanya sekedar masalah yang sepele. Sehingga kebanyakan masyarakat menggunakan calo dalam membantu perpanjangan SIM/STNK. Selain membutuhkan dana tambahan, juga butuh waktu yang lama. Sekarang pemerintah telah satu langkah lebih maju dari masa-masa lalu, dimana Dalam pengurusan / perpanjangan SIM/STNK, tidak berbelit-belit seperti dulu, melainkan hanya cukup menunggu beberapa jam saja sudah selesai, selain menghemat waktu, masyarakat merasa puas dengan aturan yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Selain tidak berbelit-belit seperti dulu lagi, yang tentunya dapat menghemat biaya juga, karena tidak lagi menggunakan jasa calo. Ini salah satu langkah maju yang telah diterapkan Oleh pemerintah Indonesia saat ini dan semoga kedepannya diikuti dengan kemajuan-kemajuan di bidang yang lainnya. Kemajuan kecil yang saat ini kita jumpai dalam sistim birokrasi kita, patut kita syukuri, dan alangkah baiknya kemajuan-kemajuan ini diikuti dengan kemajuan-kemajuan di birokrasi kita lainnya, dimana yang paling penting yang kita akan bahas disini adalah sistim birokrasi dalam penanganan segala perijinan para pelaku dunia bisnis yang ada di Indonesia, atau para investor yang akan mengembangkan usahanya di Indonesia. Hendaknya pemerintah atau instansi yang terkaitpun tidak mempersulit dalam pengeluaran izin-izin mendirikan perusahaannya di Indonesia, yang banyak memakan waktu lama serta biaya yang akan dikeluarkanpun membengkak. Akibatnya hanya akan menghambat pendirian usaha itu sendiri. Yang ujung-ujungnya membuat rasa putus asa pada pengembang atau pelaku bisnis, yang tak jarang pula bahkan mengurungkan niat untuk membuka usahanya di Indonesia, karena dirasa hanya membuang-buang waktu percuma yang akhirnya banyak investor yang meninggalkan Indonesia, dan memilih

